

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA

Bambang Sigit Widodo

Dosen FIS Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAKSI

Arah kebijakan fiskal adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien guna mencapai kesejahteraan masyarakat Indonesia. Prioritas utama pembangunan adalah untuk mengentaskan permasalahan dasar bangsa, dan salah satunya adalah peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Dengan menyusun kebijakan ekonomi yang transparan dan akuntabel maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan secara menyeluruh. Agar tidak terjadi disorientasi anggaran maka aspek manfaat dan kejelasan prioritas yang tepat sasaran menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan ekonomi.

Kata Kunci : *kebijakan ekonomi, aksesibilitas pendidikan*

PENDAHULUAN

Dalam RAPBN 2007 yang disampaikan oleh pemerintah dalam sidang paripurna DPR, pemerintah telah menetapkan empat arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh oleh pemerintah. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan kedepan dan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat seperti tema RAPBN tahun 2007. Pertama, kebijakan fiskal dalam RAPBN 2007 diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif namun tetap efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi. Kedua, kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam memelihara dan memantapkan stabilitas perekonomian dan berperan serta sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Ketiga, kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu: penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesempatan kerja, investasi, dan ekspor; revitalisasi pertanian dan pembangunan pedesaan; peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan; penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik; mitigasi dan penanggulangan bencana; dan pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir. Keempat, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dengan

tujuan antara lain untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta antar daerah, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

Anggaran publik atau anggaran pemerintah memainkan sederet peranan dalam pembangunan suatu negara. Secara teoritis anggaran pemerintah memainkan 3 fungsi utama, yaitu: fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas. Dalam fungsi alokasi ini, anggaran pemerintah memainkan peranan dalam pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik atau penyelenggaraan pemerintahan yang pada akhirnya juga dalam rangka pelayanan publik. Dalam fungsi yang lain termasuk pula pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (fungsi distribusi) serta penciptaan lingkungan makroekonomi yang kondusif (fungsi stabilisasi). Fungsi-fungsi dasar tersebut kemudian melandasi perumusan kebijakan fiskal baik dari sisi pendapatan, pembiayaan maupun belanja negara.

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian agenda-agenda ini, diperlukan prioritas pembangunan sesuai dengan ketersediaan pendanaan dan kebutuhan pembangunan. Secara lebih spesifik dapat dikatakan bahwa alokasi anggaran pemerintah seyogyanya berorientasi pada urutan prioritas pembangunan nasional dimaksud. Pada tahun 2005, mengambil langkah kebijakan perubahan format belanja negara. Perubahan format belanja negara ini dilandasi oleh UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Perubahan dimaksud adalah dengan menjalankan sistem penganggaran yang terpadu (*unified budget*) yaitu dengan menyatukan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan yang sebelumnya dipisahkan. Perubahan lainnya adalah reklasifikasi rincian belanja negara menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja, yang sebelumnya menurut sektor dan jenis belanja. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan klasifikasi internasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan belanja negara (Shah: 1997). Melihat dari arah kebijakan fiskal yang berorientasi pada persoalan mendasar pembangunan termasuk pendidikan di dalamnya, maka sudah sepatutnya mendapatkan perhatian serius pada aspek implementasinya.

Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan kajian serius dalam tulisan ini berkaitan dengan: (1) Arah kebijakan ekonomi pembangunan, (2) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas terhadap pendidikan dan (3) Akselerasi pendidikan dan pembangunan ekonomi, serta (4) Kendala dan tantangan.

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Pembangunan ekonomi dalam masa mendatang diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran pokok yang merupakan fondasi utama perekonomian bangsa. Kemandirian pangan dapat dipertahankan pada tingkat aman dan dalam kualitas gizi yang memadai serta tersedianya instrumen jaminan pangan untuk tingkat rumah tangga.

Perekonomian harus dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi dan persaingan sehat dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan serta kepentingan nasional (Sumodiningrat: 1999). Perekonomian dikembangkan berorientasi pada daya saing global berbasis keunggulan komparatif, sumberdaya alam melimpah menjadi perekonomian yang berkeunggulan kompetitif dengan prinsip-prinsip dasar: mengelola secara berkelanjutan, peningkatan produktivitas nasional melalui penguasaan, penyebaran, penerapan, dan penciptaan (inovasi) ilmu pengetahuan dan teknologi; mengelola secara berkelanjutan kelembagaan ekonomi yang melaksanakan praktik terbaik dan pemerintahan yang baik, dan mengelola secara berkelanjutan sumberdaya alam sesuai kompetensi dan keunggulan daerah.

Peningkatan efisiensi, modernisasi, dan nilai tambah kegiatan primer terutama sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan didorong agar mampu bersaing di pasar lokal dan internasional serta untuk memperkuat basis produksi secara nasional. Kepentingan ini merupakan faktor strategis karena berkenaan dengan pembangunan perdesaan, pengentasan kemiskinan dan keterbelakangan, serta ketahanan pangan.

Daya-saing global perekonomian ditingkatkan dengan mengembangkan pola jaringan rumpun industri (*industrial cluster*) sebagai fondasinya, berdasarkan 3 (tiga) prinsip dasar: (1) Pengembangan rantai nilai tambah dan inovasi yang utamanya adalah pilihan terhadap arah pola pengembangan yang ditetapkan pada suatu periode tertentu; (2) Penguatan (perluasan dan pendalaman) struktur rumpun industri dengan membangun keterkaitan antarindustri dan antara industri dengan setiap aktivitas ekonomi terkait (sektor primer dan tersier, UKM maupun perusahaan penanaman modal asing); (3) Pembangunan fondasi ekonomi mikro (lokal) agar terwujud lingkungan usaha yang kondusif melalui penyediaan berbagai infrastruktur peningkatan kapasitas kolektif (teknologi, mutu, peningkatan kemampuan tenaga kerja dan infrastruktur fisik) serta penguatan kelembagaan ekonomi yang dapat menjamin bahwa peningkatan interaksi, produktivitas, dan inovasi yang terjadi, melalui persaingan sehat, dapat secara nyata meningkatkan daya saing perekonomian secara berkelanjutan.

Peningkatan keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan didorong secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan *backward linkages* dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'. Peningkatan keterkaitan tersebut memerlukan adanya perluasan dan diversifikasi aktivitas ekonomi dan perdagangan (non-pertanian) di pedesaan yang terkait dengan pasar di perkotaan.

Pertumbuhan kota-kota besar dan metropolitan dikendalikan dalam suatu sistem wilayah pembangunan yang berkelanjutan, melalui: (1) Penerapan manajemen perkotaan (*urban-sprawl management*) yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona

penyangga (*buffer zone*) di sekitar kota inti, serta peningkatan peran dan fungsi kota-kota menengah dan kecil di sekitar kota inti agar kota-kota tersebut tidak hanya berfungsi sebagai *dormitory town* tetapi dapat menjadi kota mandiri; (2) Pengembangan kegiatan ekonomi kota (*urban economic development*) yang ramah lingkungan seperti industri jasa keuangan, perbankan, asuransi, industri telematika dan lain-lain; serta peningkatan kemampuan keuangan daerah perkotaan; peningkatan kemampuan keuangan daerah perkotaan; (3) Revitalisasi kawasan kota (*urban revitalization*) meliputi pengembalian fungsi kawasan melalui membangun kembali kawasan; peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya; serta penataan kembali pelayanan fasilitas publik.

Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh didorong sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pengembangan produk unggulan daerah, serta mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, keterpaduan dan kerjasama antar sektor, antar pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung peluang berusaha dan investasi di daerah.

Sektor keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisis melalui: implementasi sistem Jaring Pengaman Sektor Keuangan Indonesia, peningkatan kontribusi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dalam pendanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pertumbuhan perbankan nasional. Dengan demikian, setiap jenis investasi (baik jangka pendek maupun jangka panjang) akan memperoleh sumber pendanaan yang sesuai dengan karakteristik jasa keuangan. Selain itu, semakin beragamnya lembaga keuangan akan memberikan alternatif pendanaan lebih banyak bagi seluruh lapisan masyarakat.

Perbaiki pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan (Coe: 1989). Dalam rangka meningkatkan kemandirian, peran pinjaman luar negeri dijaga pada tingkat yang aman, sementara sumber utama dalam negeri yang berasal dari pajak terus ditingkatkan efektivitasnya. Kepentingan utama pembiayaan pemerintah adalah penciptaan pembiayaan pembangunan yang dapat menjamin kemampuan peningkatan pelayanan publik baik di dalam penyediaan pelayanan dasar, prasarana dan sarana fisik serta ekonomi, dan mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Kelembagaan ekonomi dikembangkan sesuai dinamika kemajuan ekonomi dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik di

dalam menyusun kerangka regulasi dan perijinan yang efisien, efektif, dan non-diskriminatif; menjaga persaingan usaha secara sehat mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat dan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standardisasi produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan kebijakan pengembangan teknologi sesuai dengan pengembangan ekonomi nasional; dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan ekonomi.

PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSISIBILITAS TERHADAP PENDIDIKAN

Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kualitas SDM Indonesia sehingga dapat bersaing dalam era global dengan tetap berlandaskan pada norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat Indonesia secara luas dan tanpa diskriminasi. Oleh karena itu perlu disediakan layanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau untuk semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta pembebasan biaya pendidikan bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar yang berasal dari keluarga miskin. Penyediaan pelayanan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan sosial ekonomi Indonesia di masa depan termasuk untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pendalaman penguasaan teknologi dan pemberian perhatian yang lebih besar pada masyarakat miskin, dan yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan kepulauan. Pembangunan pendidikan diarahkan pula untuk menumbuhkan kebanggaan kebangsaan, akhlak mulia serta kemampuan peserta didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multikultur yang dilandasi oleh penghormatan pada hak asasi manusia.

Pendidikan sepanjang hayat didorong sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan produktivitas penduduk Indonesia terutama penduduk usia dewasa. Disamping itu pengelolaan pendidikan dimantapkan agar efisien dan efektif dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, serta untuk menghadapi persaingan dengan institusi pendidikan luar negeri yang akan semakin banyak di masa depan.

AKSELERASI PENDIDIKAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Tingkat pendidikan tentunya memiliki korelasi terhadap peningkatan pembangunan ekonomi. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkatkan produktivitas pekerja. Jika produktivitas pekerja meningkat, pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Di sisi lain kenaikan produktivitas berarti kenaikan penghasilan. Selalu diasumsikan bahwa manfaat dari kenaikan pendidikan secara agregat akan lebih besar bagi kelompok miskin. Dengan demikian, jika tingkat pendidikan meningkat,

penghasilan kelompok miskin juga akan tumbuh lebih cepat dan pada akhirnya ketimpangan akan mengecil.

Menurut Alhumami (2004) pendidikan memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui dua cara. Pertama, pendidikan menciptakan pengetahuan baru yang membawa pengaruh terhadap proses produksi. Pendekatan ini lazim disebut *Schumpeterian growth* yang mengandaikan, pertumbuhan ekonomi itu didorong akumulasi modal manusia. Modal manusia, yang diperankan kaum profesional, para ahli, teknisi, dan pekerja, merupakan penggerak utama kemajuan ekonomi. Kedua, pendidikan menjadi medium bagi proses difusi dan transmisi pengetahuan, teknologi, dan informasi yang dapat mengubah cara berpikir, cara bertindak, dan kultur bekerja. Unsur pengetahuan, teknologi, dan informasi merupakan kekuatan transformatif yang dapat memacu akselerasi pembangunan ekonomi.

Dalam konteks demikian, pendidikan memberi sumbangan dalam menyediakan tenaga kerja berpengetahuan, berketerampilan, dan menguasai teknologi sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Pengalaman negara-negara *Organisation for Economic Co-operation and Development* menunjukkan, kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi itu amat nyata. Sebagai contoh, selama kurun waktu 1920-an sampai 1990-an, pembangunan pendidikan di AS telah memberi sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 14 persen. Bila *advances in knowledge* yang relevan dengan proses produksi dikonversi secara ekonomi, sumbangannya meningkat berkali lipat mencapai 42 persen.

Namun demikian tidak sedikit literatur yang menunjukkan bagaimana perekonomian sebuah negara bisa tumbuh, tetapi tidak cukup mampu menjelaskan kesenjangan tingkat pendapatan per kapita antar negara di dunia. Baru ketika variabel modal manusia diikutsertakan dalam perhitungan, sebagian dari kesenjangan itu bisa dijelaskan. Selain tidak bisa menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi, pendidikan juga tidak berhasil menjelaskan fenomena membesarnya kesenjangan dalam pendapatan per kapita. Menurut Pritchett (dalam Perdana: 2003) menunjukkan terjadinya konvergensi tingkat pendidikan antar negara di dunia. Sepanjang 1960-1995, deviasi standar dalam tingkat pendidikan turun dari 0,94 menjadi 0,56. Tapi, di saat yang sama, deviasi standar untuk pendapatan per kapita antarnegara meningkat dari 0,93 menjadi 1,13.

Tingkat pendidikan di negara-negara berkembang sebenarnya mengalami peningkatan drastis pada tahun 1960-1990. Easterly (2001) menunjukkan bahwa median angka partisipasi sekolah dasar meningkat dari 88 persen menjadi 90 persen, sementara untuk sekolah menengah dari 13 persen menjadi 45 persen. Selanjutnya, jika di tahun 1960 hanya 28 persen negara di dunia yang angka partisipasi sekolah dasarnya mencapai 100 persen, di tahun 1990 menjadi lebih dari separuhnya. Nyatanya, kenaikan drastis dari tingkat pendidikan di negara-negara berkembang tidak

menjelaskan kinerja pertumbuhan ekonomi. Ambil contoh Afrika. Antara tahun 1960 hingga tahun 1985 pertumbuhan tingkat sekolah di benua itu tercatat lebih dari 4 persen per tahun. Nyatanya, ekonomi negara-negara di Afrika hanya tumbuh 0,5 persen per tahun. Itu pun karena ada “keajaiban ekonomi” di Afrika, yaitu Botswana dan Lesotho. Kebanyakan negara Afrika lain justru mencatat pertumbuhan negatif dalam periode tersebut. Kasus ekstrem dialami Senegal yang mengalami pertumbuhan angka sekolah hampir 8 persen per tahun, tetapi memiliki pertumbuhan ekonomi yang negatif.

Dari penjelasan tadi dapat dimaknai bahwa betapa pentingnya intervensi pemerintah dalam hal perbaikan (*improvement*) pendidikan diperlakukan secara tepat. Banyak faktor yang menyebabkan keterpurukan kualitas pendidikan. Jika perwujudan pembangunan ekonomi ingin dijamin oleh peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sebaiknya arah perbaikan mutu SDM bangsa Indonesia adalah penyiapan penduduk untuk selalu bisa melakukan sesuatu yang produktif (diukur dengan kemampuan memperoleh pendapatan) dan kemudian mampu meningkatkan prestasi kerja. Penentunya adalah bagaimana proses pendidikan dirancang sejak usia prasekolah hingga saat sedang bekerja

Jika pun reorientasi penyempurnaan sistem pendidikan yang menuntut komitmen bersama masyarakat dan pemerintah, diarahkan antara lain untuk penyiapan SDM bermutu yang pada saat bekerja akan terus dapat meningkatkan prestasi dan produktivitas sehingga secara akumulatif daya saing bangsa menjadi membaik. Agenda ini penting dilakukan sejak hari ini mengingat daya saing bangsa Indonesia yang terus merosot, jauh di bawah negara yang sejajar sebelumnya seperti Malaysia dan Thailand. Negara-negara yang semakin maju dan sejahtera terbukti ditopang oleh ikhtiar pemerintah beserta masyarakat dan dunia kerja (perusahaan dan industri) untuk selalu melakukan perbaikan mutu SDM yang terus-menerus dan yang menarik selalu disesuaikan terhadap perkembangan kemajuan ilmu dan teknologi di tataran internasional.

KENDALA DAN TANTANGAN KEBIJAKAN EKONOMI

Menurut M Chatib Basri dari Fakultas Ekonomi UI memperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai rata-rata 6,3 persen (skenario tinggi) dan 5 persen (skenario rendah) dalam periode 2004-2009. Pertumbuhan ekonomi yang rendah ini menurunkan kesempatan kerja di sektor formal dan mendorong pekerja masuk ke sektor informal. Ada kekhawatiran di sini, yakni bahwa tingkat upah di sektor informal jauh lebih rendah dibandingkan dengan sektor formal. Implikasinya, peningkatan jumlah pekerja di sektor informal pada gilirannya akan menurunkan daya beli. Itu sebabnya, penyediaan lapangan kerja di sektor formal melalui pertumbuhan ekonomi menjadi jawaban. Oleh karena itu, dalam jangka panjang kesinambungan pertumbuhan ekonomi akan tergantung pada

perbaiki kualitas tenaga kerja melalui reformasi pendidikan, termasuk mengubah paket standar (*one size fits all*) ke variasi berdasarkan kebutuhan sekolah dan daerah, serta perbaikan dalam total faktor produktivitas dan peningkatan stok modal melalui investasi.

Tahun 2009 rasio investasi terhadap produk domestik bruto diperkirakan akan mencapai 28,1 persen, di mana sekitar 70 persen diharapkan akan berasal dari investasi swasta domestik dan asing. Artinya, peran swasta akan menjadi jauh lebih menonjol, sedangkan pemerintah berfungsi menyediakan iklim yang kondusif dan infrastruktur yang baik. Dari sisi fiskal, agenda yang perlu diperhatikan adalah masalah kesinambungan fiskal, termasuk dari guncangan eksternal dan masalah *contingent liabilities*. Itu sebabnya, reformasi perpajakan menjadi penting, termasuk reformasi hubungan keuangan daerah, dengan misalnya memperkuat *taxing power* pemerintah daerah dengan mengalihkan pajak pusat menjadi pajak daerah, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (Osborne: 1993).

Iklim berusaha yang kondusif tentunya dapat mendorong daya saing (Ohmae: 1991). Lemahnya daya saing Indonesia bersumber pada problem sisi penawaran karena seperti pasar tenaga kerja yang kaku, buruknya iklim investasi terkait dengan pelbagai ketidakpastian hukum, biaya tinggi, penyelundupan, dan rendahnya produktivitas. Akibatnya, terjadi kemacetan dalam ekspansi produksi dan peningkatan produktivitas. Karena itu, perlu penataan ulang iklim usaha yang probisnis. Dalam jangka pendek, yang dibutuhkan adalah harmonisasi peraturan pusat dan daerah, mengurangi ekonomi biaya tinggi, serta aktivitas ekonomi rente melalui deregulasi, debirokratisasi, dan juga pasar tenaga kerja yang luwes. Strategi kebijakan industri yang jelas, transparan, dan berkesinambungan dengan basis keunggulan komparatif menjadi penting. Namun harus diingat, perlu adanya jadwal penurunan tingkat proteksi yang jelas untuk mencegah terjadinya aktivitas ekonomi rente dan inefisiensi yang permanen.

Ada beberapa hal yang menjadi kendala dan tantangan dalam penyusunan kebijakan ekonomi berkaitan dengan: (1) alokasi anggaran untuk fungsi-fungsi yang krusial baik bagi publik maupun pembangunan nasional adalah kecil. Contohnya dalam APBN tahun 2006 lalu bahwa alokasi terbesar adalah pada fungsi pelayanan umum. Selain alokasinya yang terbesar, alokasi pemerintah pada pos fungsi pelayanan umum ini secara relatif jauh lebih besar dibandingkan pos-pos fungsi lainnya dengan porsi sebesar 61,60%. dari sebesar fungsi yang ada, hanya pelayanan umum dan pendidikan (10,12%) yang mendapatkan porsi di atas 10%. Sementara sisanya memperoleh porsi rata-rata sebesar 3,14%. Tak salah kemudian jika dikatakan bahwa alokasi anggaran untuk fungsi-fungsi yang krusial baik bagi publik maupun pembangunan nasional adalah "anggaran sisa". (2) Ketidakjelasan prioritas di dalam RPJMN dan RKP. Dalam RPJMN 2005-2009 tidak menunjukkan prioritas relatif masing-masing poin. Secara

politis mungkin saja ini satu langkah “aman” bagi pemerintah. Namun dari sisi konsistensi kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan, penjabaran prioritas semacam ini menciptakan celah-celah yang menyebabkan terjadinya disorientasi anggaran dan tidak optimalnya pencapaian prioritas pembangunan. (3) Pengajuan proyek kepada pemerintah seringkali tidak mengacu pada prioritas pembangunan nasional. Entah karena ketidakprofesionalan pemerintah dalam menyusun anggaran atau unsur kesengajaan untuk menciptakan celah untuk praktik-praktik korupsi, namun yang jelas disorientasi anggaran terus saja terjadi. Penyusunan anggaran di departemen-departemen tidak lebih dari “*copy paste*” dari anggaran sebelumnya. Hal ini terbukti dengan tidak adanya perbedaan signifikan antar draf yang diajukan dari tahun ke tahun ke DPR.. (4) Anggaran berdasarkan negosiasi dan kepentingan. Diorientasi anggaran disebabkan pula oleh pengajuan dan persetujuan anggaran yang lebih dilatarbelakangi oleh kepentingan sejumlah pihak daripada kepentingan publik secara luas. Hal ini diperparah lagi dengan persetujuan anggaran mulai dari departemen, pemerintah dan DPR yang lebih didasari oleh negosiasi-negosiasi baik demi kepentingan segelintir orang maupun kepentingan politis (Rachbini:2002). Kondisi seperti inilah yang kemudian menciptakan celah bagi terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme yang kemudian berujung pada disorientasi anggaran dan inefektifitas dan inefisiensi pembiayaan pembangunan. Bahkan banyak dari proyek-proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah hanya sebagian kecil saja yang benar-benar digunakan untuk membiayai pembangunan. Sebagian besar telah bocor baik dalam proses pencairan anggaran dari ke daerah dan dari pusat kepada departemen-departemen; legitimasi urgensi atau kepentingan satu proyek; atau bahkan dalam proses auditing anggaran suatu proyek.

SIMPULAN

Kebijakan ekonomi sangat berpengaruh terhadap implementasi permasalahan dasar yang menjadi prioritas pembangunan seperti pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas serta aksesibilitas pendidikan. Kebijakan ekonomi disusun berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi, daya saing global, peningkatan efisiensi, modernisasi dan pemerataan. Perbaikan pengelolaan keuangan negara bertumpu pada sistem anggaran yang transparan, bertanggung jawab, dan dapat menjamin efektivitas pemanfaatan. Kebijakan ekonomi memiliki relevansi yang sangat signifikan bagi peningkatan kualitas pendidikan, untuk itu dalam proses menyusun kebijakan diharapkan mengedepankan aspek manfaat dan tujuannya dalam pembangunan secara keseluruhan. Dengan demikian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pembangunan dapat diantisipasi dengan mekanisme dan proses yang tepat dalam menyusun kebijakan ekonomi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhumami, Amich. 2004. **Pendidikan Tinggi dan Pembangunan Ekonomi**. Jakarta: Bappenas
- Coe, Charles K. (1989). *Public Financial Management*. New Jersey: Prentice Hall, Englewood Cliffs.
- Ohmae, Kenichi (1991). *The borderless World, Power and Strategy in the Interlinked Economic*. London: Harper Collins.
- Osborne, David and Ted Gaebler (1993). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector*. New York: Penguins Books.
- Perdana, Ari A. 2003. **Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan**. Makalah yang disampaikan dalam seminar ekonomi dan pembangunan. Jakarta: 15 maret 2003.
- Rachbini, Didik J. 2002. **Utang Luar Negeri dan Ekonomi Rakyat**. Makalah disampaikan dalam Seminar Pendalaman Ekonomi Rakyat, Utang Luar Negeri, Jakarta: 23 April 2002.
- Shah, Anwar (1997). *Balance, Accountability and Responsiveness, Lesson about Decentralization*. Washington D.C. : World Bank.
- Sumodiningrat, Gunawan (1999). **Pemberdayaan Rakyat**. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.